



MOROWALI UTARA
Tepo Asa Aroa

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN
MOROWALI UTARA

Alamat : Jalan Bumi Nangka No. 03 Kolonodale Kode Pos : 94971

VISI & MISI
KABUPATEN MOROWALI UTARA

VISI :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI
UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN
SEJAHTERA”

MISI :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, terdapat beberapa kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam LAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022.

Demikian Pernyataan Reviu LAKIP ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kolonodale, 20 Maret 2023

PI INSPEKTUR, *A*

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt.
Pembina, IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD merupakan pertanggung jawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Tahun 2022 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja OPD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diberikan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai gambaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LAKIP Ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kolonodale, 15 Februari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Daerah Kabupaten Morowali Utara,

A circular official stamp in purple ink is overlaid with a black ink signature. The stamp contains the text: "PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA" around the top edge, and "DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH" around the bottom edge. The signature is a stylized, cursive script.

DESTUBER MATO ORI, ST., M.Sc.

Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19731203 200012 1 003

DAFTAR ISI

VISI & MISI KEPALA DAERAH.....	i
PERNYATAAN TELAH DI REVIU.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
C. ASPEK STRATEGIS.....	3
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. RENCANA STRATEGI.....	9
B. INDIKATOR KINERJA.....	12
C. PERJANJIAN KINERJA.....	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	15
1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Tahun 2022	15
2. perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021-2022	19
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra tahun 2021-2026	23
4. faktor penyebab yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan	24
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
6. Program yang menunjang pencapaian kinerja tahun 2022	28
B. REALISASI ANGGARAN.....	28
BAB IV. PENUTUP	33
A. KESIMPULAN	33
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	33

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun dengan tujuan memberikan gambaran kongkrit tentang capaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam rencana kerja Tahun 2022. Laporan ini berisi hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang dikomparasikan dengan penetapan kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program-kegiatan berikut realisasinya.

Untuk itu setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Eselon II wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat/public/stakeholder dan sejauhmana aspirasi masyarakat sudah terpenuhi.

Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya telah harus menyusun Rencana Strategis dimana didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Strategis (Renstra). Demikian pula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan salah satu Instansi Pemerintah telah juga menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tahun 2021 - 2026.

Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Morowali Utara untuk mencapai tujuan pembangunan daerah pada Misi Keempat

yaitu Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah, maka Tujuan yang hendak dicapai ada 2 yaitu:

1. Meningkatnya konektivitas wilayah; dan
2. Meningkatnya kualitas Infrastuktur daerah (OPD)

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 35 Tahun 2019, Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Pasal (3) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

- Mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah yang diberikan kepada daerah kabupaten.

2. Fungsi

- Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (1), Dinas PU, Penataan Ruang Perumahan dan kawasan permukiman Daerah Mempunyai Fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Penanggung jawab dalam pengumpulan data/informasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah, Sesuai tugas dan fungsinya Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 35 Tahun 2019 adalah Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Publik yang dibantu oleh Jabatan Analis Data dan Informasi.

C. ASPEK STRATEGI

Dalam upaya merealisasikan pemerintahan yang baik (good governance) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan berbagai program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Kabupaten Morowali Utara yang telah dituangkan dalam rencana strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026. **VISI KABUPATEN MOROWALI UTARA YAITU TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA.**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara berusaha mencapai visi tersebut melalui peningkatan sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, demokratis, akuntanilitas, efisien, responsive, penegakan hukum, berorientasi membangun konsensus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini dituangkan dalam tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 tahun kedepan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mewujudkan visi tersebut menetapkan 4 sasaran strategis dan yang akan dicapai pada tahun 2022 dan diukur dengan mengaplikasikan 6 indikator kinerja.

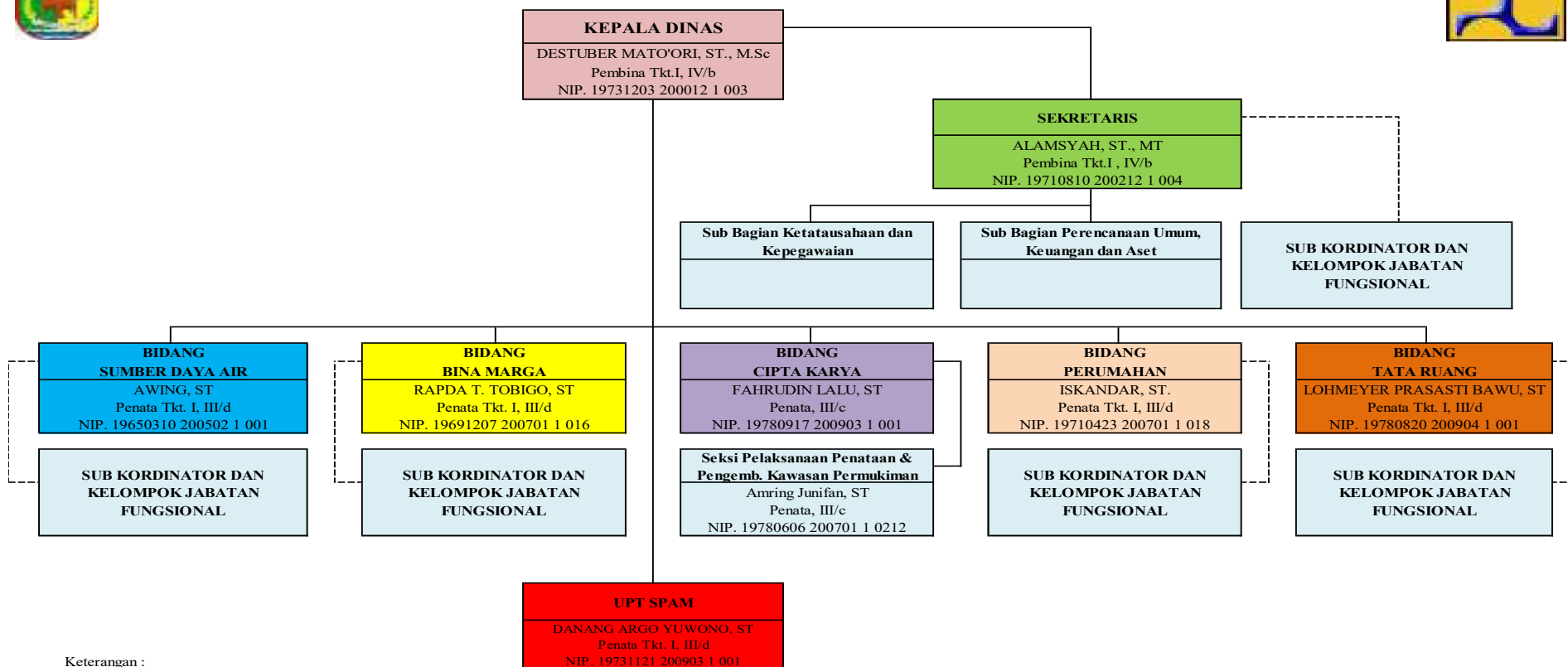
D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2021 Pasal (5) Tentang Kedudukan dan susunan organisasi dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman daerah.

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah merupakan Dinas tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan Umum, Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Ketatausahaan dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Pelaksanaan Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Tata Ruang;
 - g. Bidang Perumahan; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis SPAM;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g masing-masing membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH



Keterangan :
 ————— Garis Komando
 - - - - - Garis Koordinasi

BUPATI MOROWALI UTARA,

DELIS JULKARSON HEHI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 189 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 71 orang dan Pegawai Kontrak sebanyak 118 orang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Dinas	1	
2.	Sekretaris	1	
3.	Kepala Bidang	5	
4.	Kepala Seksi	1	
5.	Kasubag	-	
Jumlah		8	

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	6	
2	Golongan III	44	
3	Golongan II	20	
4	Golongan I	1	
Jumlah		71	

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Doktoral	-	
2	Magister S-2	3	
3	Sarjana S-1	45	
4	Sarjana Muda/Diploma	6	
5	SMA/SMK	16	
6	SMP	-	

7	SD	1
Jumlah		71

Jumlah Pegawai kontrak berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Doktoral	-	-
2	Magister S-2	-	-
3	Sarjana S-1	56	
4	Sarjana Muda/Diploma	2	
5	SMA/SMK	60	
6	SMP	-	
7	SD	-	
Jumlah		118	

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jmh	Sat.	Keadaan			Ket
				Baik	Rusak	Rusak berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mobil Inova	1	Unit	1			
2	Mobil Xenia	1	Unit	1			
3	Mobil Avanza	1	Unit	1			
4	Sepeda Motor Metic	15	Unit	15			
5	Sepeda Motor CRF	4	Unit	4			
6	Sepeda Motor Kawasaki	12	Unit				
7	Sepeda Motor New Vixion	2	Unit	2			
8	Sepeda Motor Jupiter Z	-	Unit				
9	Mobil Dump Truck	2	Unit	2			
10	Mobil Tangki	1	Unit	1			
11	Meja 1 Biro	23	Buah	23			
12	Meja 1,5 Biro	100	Buah			11	
13	Kursi Putar Sandaran Full	25	Buah	25			
14	Kursi Putar Sandaran Pendek	40	Buah	39		14	
15	Kursi Lipat Chitos	194	Buah	177		17	
16	Kursi Sofa	2	Set	2			
17	Lemari Besi 2 Pintu	10	Buah	10			

18	Lemari Brangkas	1	Buah	1			
19	Filing Kabinet	8	Buah	8			
20	Lemari Kayu	22	Buah	22			
21	Lemari Gantung	3	Buah	3			
22	Kulkas	1	Buah	1			
23	AC	29	Buah	24		5	
24	Komputer PC	15	Unit	13	1	1	
25	Laptop	75	Unit	71		4	
26	UPS	10	Unit			10	
27	Print	65	Unit	49		16	
28	Scanner	6	Buah	6			
29	Dispenser	8	Buah	6		2	
30	Televisi	3	Buah	3			
31	Jam Dinding	5	Buah	3		2	
32	Kipas Angin	3	Buah	1		2	
33	Concrete Mixer	11	Unit	11			
34	Meja Kayu/rotan	1	Buah	1			
35	Generating Set (GENSET)	1	Unit		1		
36	Mesin Potong Rumput	2	Unit	2			
37	Hand Compression Machine	1	Unit	1			
38	Camera	18	Unit	18			
39	Filter	20	Unit	20			
40	Mesin Pompa Air	5	Unit	5			
41	Mesin Pemotong Biasa	2	Unit	2			
42	Wireless	1	Unit	1			
43	Volt Meter Digital	3	Unit	3			
44	Slump Test Set	1	Unit	1			
45	Compaction	2	Unit	2			
46	Core Hardness Tester	1	Unit	1			
47	Penetrometer	2	Unit	2			
48	Sleve Shaker	1	Unit	1			
49	Tripel Beam Balance	1	Unit	1			
50	Moisture Content Tester	1	Unit				
51	Camera Photo Micrograph	2	Unit	1	1		
52	Total Station	1	Unit	1	1		
53	Kursi Kerja	42	Unit	4		1	
54	Proyektor Infokus	6	Unit	6			

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI ORGANISASI.

Dalam rangka mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu terus memanfaatkan peluang, potensi dan kekuatan menuju perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat. Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Tahun 2021 – 2026, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

A.1 Keselarasan Kinerja

Untuk Mewujudkan keselarasan antara Kinerja RPJMD Kab. Morowali Utara Tahun 2021 - 2026 dengan Kinerja RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kab. Morowali Utara Tahun 2021 – 2026, Maka Disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman daerah Dengan Kinerja Kepala Daerah. Untuk Kinerja Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman Selaras dengan Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah (OPD)” Pada Misi Ke-4 Kepala Daerah yakni **“Meningkatkan Ketersediaan dan Keandalan Infrastruktur Wilayah Untuk Menunjang Konektivitas dan Pemerataan Wilayah”**.

✚ Keselarasan Kinerja MISI – 4

MISI 4	Meningkatkan Ketersediaan dan Keandalan Infrastruktur Wilayah Untuk Menunjang Konektivitas dan Pemerataan Wilayah		
Tujuan	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infastruktur Dasar		
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah (OPD)		
Sasaran 2	Menigkatnya Konektivitas Wilayah		

A.2 Tujuan dan Sasaran

✚ Tujuan

Berdasarkan faktor - faktor kunci keberhasilan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan tujuan terpilih sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
2. Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja.
3. Mewujudkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah dan pertanahan secara terpadu dan konsisten.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.
5. Meningkatkan mutu perumahan dan permukiman.
6. Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya.

✚ Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Sasaran-sasaran Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dirumuskan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintah;
2. Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi.
3. Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah.
4. Tersedianya Prasarana dan Sarana air baku.
5. Tersedianya Prasarana dan sarana air bersih.
6. Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
7. Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
8. Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung.
9. Terbangunnya perumahan dan permukiman sesuai standar minimum.
10. Tersedianya Pengembangan Permukiman.
11. Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
12. Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan.
13. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
14. Terbangunnya jaringan transportasi.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah adalah sebagai berikut:

TABEL 1
TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STARTEGIS
Meningkatnya Kualitas Infrastuktur daerah (OPD)	Indeks infrastruktur daerah	- Terwujudnya konektivitas antar wilayah yang mantap
		- Terciptanya pemanfaatan Tata Ruang yang nyaman, Aman dan Sehat
		- Terbukanya akses masyarakat terhadap rumah layak huni
		- Terciptanya infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah adalah sebagai berikut:

TABEL 2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Daerah Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	PARAMETER/ RUMUS IKU	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Per Panjang Jalan Seluruhnya X 100 %	Bidang Bina Marga
			Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Realisasi RTRW Per Rencana Peruntukan RTRW X 100 %	Bidang Tata Ruang
			Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni Per Jumlah Penduduk	Bidang Perumahan
			Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	Persentase Rumah tangga yang berkases air bersih	Rumah Tangga Berakses Air Bersih Per Jumlah Rumah Tangga X 100%	Bidang Cipta Karya
				Persentase rumah tinggal bersanitasi	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Per Jumlah Rumah Tinggal X 100%	Bidang Cipta Karya
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Per Luas Irigasi Kabupaten X 100%	Bidang Sumber Daya Air

B. PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 2022

Tabel. 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH YANG MANTAP	PERSENTASE PANJANG JARINGAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP	%	60,74%
2	TERCIPTANYA PEMANFAATAN TATA RUANG YANG NYAMAN, AMAN DAN SEHAT	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP RTRW	%	55%

3	TERBUKANYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP RUMAH LAYAK HUNI	RASIO RUMAH LAYAK HUNI	Rasio	0,17
4	TERCIPTANYA INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR YANG BERKUALITAS	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BERAKSES AIR BERSIH	%	57,50%
		PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI	%	43,89%
		PERSENTASE IRIGASI KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	%	42 %

NO	PROGRAM KEGIATAN	PAGU (RP)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara	10.832.229.704
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	177.144.000
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	14.649.692.965
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan System Penyediaan Air Minum	9.934.244.843
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan System Air Limbah	5.361.560.000
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan System Drainase	2.093.600.000
7	Program Pengembangan Permukiman	10.623.989.200
8	Program Penataan Bangunan Gedung	14.151.540.200
9	Program Penyelenggaraan Jalan	182.589.816.165
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.095.214.954
11	Program Kawasan Permukiman	250.000.000
12	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	8.437.806.427
13	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	107.900.000

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 266.279.169.667,00 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2021 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel. 4
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	FORMULASI IKU
1	Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	- Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	60,74%	55,46%	91,3%	Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Per Panjang Jalan Seluruhnya X 100 %
		CAPAIAN RATA – RATA			91,3%	
2	Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	- Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	55%	45%	81,81%	Realisasi RTRW Per Rencana Peruntukan RTRW X 100 %
		CAPAIAN RATA – RATA			81,81%	
3	Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	- Rasio Rumah Layak Huni	0,17	0,16	106 %	Jumlah Rumah Layak Huni Per Jumlah Penduduk
		CAPAIAN RATA – RATA			106 %	
4	Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	- Persentase Rumah Tangga Yang Berkases Air Bersih	57,50%	57,06%	99,23%	Persentase Rumah Tangga Yang Berkases Air Bersih
		- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	43,89%	49,98%	113%	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Per Jumlah Rumah Tinggal X 100%
		- Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	42%	43,92%	104%	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Per Luas Irigasi Kabupaten X 100%
		CAPAIAN RATA – RATA			105,41%	

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel. 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \geq$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah adalah sebanyak 4 sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 4 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Tahun 2022.

Dari 4 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 6
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	$91 \geq$	5	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	1	Tinggi
3	$66 \leq 75$	0	Sedang
4	$51 \leq 65$	0	Rendah
5	≤ 50	0	Sangat Rendah
	JUMLAH	6	

Gambaran pencapaian kinerja dari 4 (Empat) sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Ke satu Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap.

Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran terwujudnya konektivitas antar wilayah yang mantap dengan indikator persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2022 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 55,46%. Walaupun realisasinya belum sesuai dengan target yang ingin dicapai tetapi predikat pencapaian kinerja yang di didapatkan masuk dalam kategori sangat baik dengan persentase 91,3%. Panjang untuk jaringan jalan dalam kondisi mantap yang terealisasi pada tahun 2022 adalah 550,95 km yang terdiri dari 384,682 km dalam kondisi baik dan 166,265 km dalam kondisi sedang dari total panjang jalan keseluruhan yakni 938,76 km.

b. Sasaran Ke dua Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat.

Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran terciptanya pemanfaatan tata ruang yang nyaman, aman dan sehat dengan indikator persentase ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2022 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 45%. Walaupun realisasinya belum sesuai dengan target yang ingin dicapai tetapi predikaat pencapaian kinerja yang di didapatkan masuk dalam kategori baik dengan persentase 81,81%.

c. Sasaran Ke tiga Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni.

Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran terbukanya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan indikator rasio rumah

layak huni pada tahun 2022 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 0,16 atau 1:6 yang artinya 1 rumah layak huni terdapat 6 penduduk kab. Morowali utara yang menghuni rumah layak huni tersebut dan jika dibanding dengan target tahun 2022 telah mencapai bahkan melebihi dari target yang direncanakan, dimana target rasio rumah layak huni untuk tahun 2022 sebesar 0,17 atau 1:7 yang artinya 1 rumah layak huni terdapat 7 penduduk kab. Morowali utara yang menghuni rumah layak huni tersebut. Karna dari hasil realisasi yang melebihi target yang sudah direncanakan maka diperoleh pencapaian realisasi sebesar 106% dengan predikat sangat baik.

d. Sasaran Ke empat Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas.

Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran terciptanya infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas dengan 3 indikator kinerja yakni indikator pertama persentase rumah tangga yang berakses air bersih pada tahun 2022 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 57,06 %, persentase tersebut diperoleh dari jumlah rumah tangga berakses air bersih sebanyak 22.287 Unit yang dibagi dengan jumlah rumah tangga sebanyak 38.884 unit. indikator kedua persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2022 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 49,98 %, persentase tersebut diperoleh dari jumlah rumah tinggal berakses sanitasi sebanyak 19.433 Unit yang dibagi dengan jumlah rumah tinggal sebanyak 38.884 unit. Indikator ketiga persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2022 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 43,92 %, persentase tersebut diperoleh dari luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik seluas 2.244 Ha yang dibagi dengan luas irigasi Kabupaten berdasarkan Permen 14 tahun 2015 seluas 5.110 Ha. Dari 3 indikator kinerja tersebut diperoleh persentase rata-rata pencapaian kinerja sebesar 91,3% dengan predikat sangat baik.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 - 2022.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 -2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
			2021	2022	2021	2022
1	Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	95 %	55,46 %	95 %	91,3 %
2	Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	85 %	45 %	85 %	81,81 %
3	Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	0	0,16	0	106 %
4	Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	Persentase Rumah Tangga Yang Berkases Air Bersih	86 %	57,06 %	86 %	99,23 %
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	99 %	49,98 %	99 %	113 %
		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	0 %	43,92 %	0 %	104 %

a. Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap.

Dari tabel diatas pada sasaran Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap dapat dilihat dari indikator yaitu Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 – 2022 dapat dilihat pada tabel di atas, Tahun 2021 realisasi kinerja tercatat sebesar 95% dengan capaian kinerja sebesar 95%, tahun 2022 realisasi kinerja tercatat sebesar 55,46% dengan capaian kinerja sebesar 91,3%. Jika di bandingkan antara realisasi tahun 2021 dengan 2022 terlihat jelas bahwa di tahun 2022 realisasinya menurun jauh, perbedaan itu dikarenakan pada tahun 2021 merupakan realisasi kinerja pada akhir renstra tahun 2007-2021 dimana target renstra di akhir tahun 2021 adalah 100% yang mengakibatkan realisasinya begitu besar di bandingkan dengan

realisasi di tahun 2022 sedangkan di renstra Tahun 2021-2026 pada tahun 2022 targetnya hanya 60,73 %. Jadi walaupun realisasinya terlihat berbeda jauh atau bisa dibilang menurun dari tahun kemarin, itu tidak berarti panjang jalan dalam kondisi mantap berkurang ataupun menurun tapi sebaliknya. Berdasarkan data DD1 bidang bina marga pada tahun 2021 Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap yakni 520,61 Km dan data DD1 Pada tahun 2022 panjang jalan dalam kondisi mantap yakni 550,94 Km.

b. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW.

Dari tabel diatas pada sasaran Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat, dapat dilihat dari indikator yaitu Persentase Ketaatan Terhadap RTRW, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 – 2022 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2021 realisasi kinerja tercatat sebesar 85% dengan capaian kinerja sebesar 85%, tahun 2022 realisasi kinerja tercatat sebesar 45% dengan capaian kinerja sebesar 81,81%. Sama seperti kasus di indikator kinerja sebelumnya walaupun terlihat menurun realisasinya dibandingkan tahun sebelumnya tapi sebenarnya tidak menurun melainkan meningkat karena data awal atau baselane dalam penentuan target di tahun 2022 adalah data pada tahun 2021, berarti realisasi pada tahun di 2022 lebih besar atau meningkat di banding tahun 2021.

c. Rasio Rumah Layak Huni.

Dari tabel diatas pada sasaran Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni, dapat dilihat dari indikator yaitu Rasio Rumah Layak Huni, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2021 realisasi kinerja tercatat sebesar 0 dengan capaian kinerja sebesar 0, tahun 2022 realisasi kinerja tercatat sebesar 0,16 dengan capaian kinerja sebesar 106%. Dapat dilihat realisasi kinerja pada tahun 2021 adalah 0 itu dikarenakan adanya revisi IKU Kepala Perangkat Daerah pada tahun 2022 oleh Kementrian, sehingga formula pencapaian kinerja untuk

indikator rasio rumah layak huni untuk tahun 2021 tidak bisa dihitung atau dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022.

d. Persentase Rumah Tangga Yang Berkases Air Bersih.

Dari tabel diatas pada sasaran Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas, dapat dilihat dari indikator yaitu Persentase Rumah Tangga Yang Berkases Air Bersih, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2021 realisasi kinerja tercatat sebesar 86% dengan capaian kinerja sebesar 86% dan tahun 2022 realisasi kinerja tercatat sebesar 57,06% dengan capaian kinerja sebesar 99,23%. Dapat dilihat realisasi pada tahun 2021 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 tetapi pada pencapaian kinerja pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2021 itu di karenakan target pada akhir renstra tahun 2007-2021 adalah 100% sedangkan target renstra 2021-2026 pada tahun 2022 hanya 57,50%.

e. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi.

Dari tabel diatas pada sasaran Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas, dapat dilihat dari indikator yaitu Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2021 realisasi kinerja tercatat sebesar 99% dengan capaian kinerja sebesar 99%, tahun 2022 realisasi kinerja tercatat sebesar 49,98% dengan capaian kinerja sebesar 113%. Dapat dilihat pencapaian kinerja pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2021 sedangkan realisasi kinerja lebih besar pada tahun 2021 dibanding realisasi kinerja pada tahun 2022 dikarenakan perbedaan penentuan target pada renstra 2007-2021 dengan renstra di tahun 2021-2026 pada tahun 2022.

f. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik.

Dari tabel diatas pada sasaran Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas, dapat dilihat dari indikator yaitu Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2021 realisasi kinerja tercatat sebesar 0 % dengan capaian kinerja sebesar 0 %, tahun 2022 realisasi kinerja tercatat sebesar 43,92% dengan capaian kinerja sebesar 104%. Dapat dilihat realisasi kinerja pada tahun 2021 adalah 0 itu dikarenakan adanya revisi IKU Kepala Perangkat Daerah pada tahun 2022 oleh Kementrian, sehingga formula pencapaian kinerja untuk indikator Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik untuk tahun 2021 tidak bisa dihitung atau dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2026.

Realisasi capaian kinerja dinas PUPRPKPD tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang pada renstra dinas puprpkpd tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 9

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target RENSTRA Dinas PUPRPKPD Tahun 2021-2026.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	70%	55,46 %	79,22%
2	Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	100%	45%	45%

3	Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,16	0,16	100%
4	Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	Persentase Rumah Tangga Yang Berakses Air Bersih	65 %	57,06 %	87,76%
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	60,24 %	49,98 %	82,96%
		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	55 %	43,92 %	79,85%

Berdasarkan tabelitas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Dinas PUPRPKPD tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

- 1 (Satu) Indikator kinerja sasaran capaian kinerja $\geq 100\%$
- 0 (Nol) Indikator kinerja sasaran capaian kinerja $\geq 90\%$
- 2 (Dua) Indikator kinerja sasaran capaian kinerja $\geq 80\%$
- 2 (Dua) Indikator kinerja sasaran capaian kinerja $\geq 70\%$
- 0 (Nol) Indikator kinerja sasaran capaian kinerja $\geq 60\%$
- 1 (Satu) Indikator kinerja sasaran capaian kinerja $\leq 50\%$

4. FAKTOR PENYEBAB YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN DAN ATAU KEGAGALAN KINERJA, SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut:

a. Sasaran Pertama Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap.

Untuk Sasaran Pertama Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap melalui indikator Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap pada tahun 2022 dengan pencapaian kinerja 91,3 % dengan predikat sangat baik. Kondisi ini dapat di capai karna dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan tepat waktu serta mengoptimalkan sumber

daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan yang telah diprogramkan.

b. Sasaran Kedua Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat.

Untuk Sasaran Kedua Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat Melalui indikator Persentase Ketaatan Terhadap RTRW pada tahun 2022 dengan pencapaian kinerja rata-rata 81,81 % dengan predikat tinggi. Kondisi ini dapat di capai karna dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan tepat waktu serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan yang telah diprogramkan.

c. Sasaran Ketiga Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni.

Untuk Sasaran Ketiga Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni melalui indikator Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2022 dengan pencapaian kinerja rata-rata 106% dengan predikat sangat baik. Kondisi ini dapat di capai karna dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan tepat waktu serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan yang telah diprogramkan.

d. Sasaran Keempat Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas.

Untuk Sasaran Keempat Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas melalui indikator Persentase Rumah Tangga Yang Berakses Air Bersih, Indikator Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dan indikator Persentase Irigasi Kabupaten Dalam

Kondisi Baik. Dari ketiga indikator tersebut pada tahun 2022 pencapaian kinerja rata-rata yang diperoleh 105,41% dengan predikat sangat baik. Kondisi ini dapat di capai karna dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan tepat waktu serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan yang telah diprogramkan.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

A. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P untuk membiayai program dan kegiatan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.528.610.221,-
2	Belanja Langsung	Rp. 258.750.559.446,-
	Alokasi Total Belanja	Rp. 266.279.169.667,-

Dari total anggaran sebesar Rp. 266.279.169.667,- tersebut sampai akhir Tahun 2022 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.204.636.675,-
2	Belanja Langsung	Rp. 206.405.598.933,-
	Alokasi Total Belanja	Rp. 213.610.235.608,-

Prosentase serapan anggaran di Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.204.636.675,-
2	Belanja Langsung	Rp. 206.405.598.933,-
	Alokasi Total Belanja	Rp. 213.610.235.608,-

$$\begin{aligned}
 \text{a. Belanja Tidak langsung} &= \frac{\text{Realisasi Belanja Tidak Langsung}}{\text{Alokasi Belanja Tidak Langsung}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. 7.204.636.675,-}}{\text{Rp. 7.528.610.221,-}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{95,69 \%}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b. Belanja langsung} &= \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Alokasi Belanja Langsung}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. 206.405.598.933,-}}{\text{Rp. 258.750.559.446,-}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{79,95 \%}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c. Total Belanja} &= \frac{\text{Realisasi Total Belanja}}{\text{Alokasi Total Belanja}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. 213.610.235.608,-}}{\text{Rp. 266.279.169.667,-}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{80,22 \%}
 \end{aligned}$$

B. Sumber Daya Manusia.

Jumlah Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah sebanyak 189 Orang yang terdiri dari 71 Pegawai Negeri Sipil dan 118 Pegawai Kontrak. Dari banyaknya pegawai yang ada pada dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah belum maksimal dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang ada. karena masih kurangnya

peningkatan kualitas SDM pada Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman daerah yang berdampak pada tugas dan fungsi pegawai dimana masih banyak pegawai yang merangkap tugas di luar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6. PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Adapun program yang menunjang pencapaian kinerja Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Pertama yaitu Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap didukung oleh Program:
 - Program Penyelenggaraan Jalan
2. Sasaran kedua yaitu Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat didukung oleh Program:
 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Sasaran ketiga yaitu Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni didukung oleh Program.
 - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
4. Sasaran keempat yaitu Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas didukung oleh Program:
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum
 - Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

B. REALISASI ANGGARAN.

Dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 10**REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN
1	Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	- Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 185.742.276.486	Rp. 153.872.530.542	82,84%
2	Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	- Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 2.221.366.454	Rp. 2.219.372.477	99,91%
3	Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	- Rasio Rumah Layak Huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.	Rp. 8.723.314.323	Rp. 8.568.143.614	98,22%
4	Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Rp. 10.323.879.843	Rp. 9.321.381.203	90,28%

		- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 5.361.560.000	Rp. 4.853.560.000	90,52%
		- Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 16.091.350.692	Rp. 10.439.210.118	64,87%
5	Program Pendukung	- Persentase Pemenuhan Penunjang Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.277.653.935	Rp. 10.793.776.567	95,53%
		- Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 3.019.709.329	Rp. 3.017.826.300	99%
		- Persentase Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Permukiman	Program Pengembangan Permukiman	Rp. 8.290.448.999	Rp. 8.101.335.799	49,5%
		- Persentase Bangunan gedung yang laik fungsi	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 12.595.205.200	Rp. 1.954.854.200	69%

		- Persentase Tenaga terampil Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 132.927.000	Rp. 115.709.662	75,5%
		Persentase Ketersediaan Dokumen rencana - Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Program Kawasan Permukiman	Rp. 250.000.000	Rp. 244.895.126	93%
		Persentase terbangunnya prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan -	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 107.900.000	Rp. 107.640.000	100%

BAB IV
KESIMPULAN
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Nampak bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 masih ada indikator kinerja yang belum terlaksanakan dengan maksimal dari target yang telah direncanakan, dari 4 sasaran yang terdiri dari 6 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, diantaranya 5 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria sangat baik dan 1 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria tinggi.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan peran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 15 Februari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Daerah Kabupaten Morowali Utara,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Morowali Utara government. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA' around the perimeter and 'DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

DESTUBER MATO'ORI, ST., M.Sc.

Pembina Tkt.I, IV/b

NIP. 19731203 200012 1 003

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH**

Alamat: Jalan Bumi Nangka Nomor 03 Kolonodale Kode Pos: 94971

PERJANJIAN KINERJA APBD-P TAHUN 2022

Dalam Rangka Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DESTUBER MATO'ORI, ST., M.Sc.**
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DR. Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS.**
Jabatan : Bupati Morowali Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 1 November 2022

Pihak Kedua,
BUPATI MOROWALI UTARA

DR. Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

DESTUBER MATO'ORI, ST., M.Sc.
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19731203 200012 1 003

PERJANJIAN KINERJA APBD-P TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAERAH KAB. MOROWALI UTARA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH YANG MANTAP	PERSENTASE PANJANG JARINGAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP	%	60,74 %
2.	TERCIPTANYA PEMANFAATAN TATA RUANG YANG NYAMAN, AMAN DAN SEHAT	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP RTRW	%	55 %
3.	TERBUKANYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP RUMAH LAYAK HUNI	RASIO RUMAH LAYAK HUNI	Rasio	0,17
4.	TERCIPTANYA INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR YANG BERKUALITAS	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BERAKSES AIR BERSIH	%	57,50 %
		PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI	%	43,89 %
		PERSENTASE IRIGASI KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	%	42 %

NO.	PROGRAM KEGIATAN	PAGU (RP.)	KET.
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,277,653,935	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	132,927,000	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16,091,350,692	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10,323,879,843	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5,361,560,000	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3,019,709,329	
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	8,290,448,999	
8.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14,385,596,406	
9.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	185,922,276,486	
10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2,392,552,654	
11.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	250.000.000	

12.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	8,723,314,323	
13.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	107,900,000	
	JUMLAH.....	266,279,169,667	

Kolonodale, 1 November 2022

Bupati Morowali Utara,

DR. Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Daerah

DESTUBER MATO'ORI, ST., M.Sc.
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19731203 200012 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

Alamat: Jalan Bumi Nangka Nomor 03 Kolonodale

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR: 188.4/1582.b/DPUPRPKPD/XI/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Program, Kegiatan dan Indikatornya Wajib mengacu pada Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditepapkan di: Kolonodale

Pada Tanggal : 2 November 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah
Kabupaten Morowali Utara,


DESTUBER MATU ORI, ST., M.Sc
NIP. 19731203 200012 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 188.4/1582.b/DPUPRPKPD/XI/2022
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2022

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KETERANGAN/ FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah (OPD)	Indeks Infrastruktur Daerah	Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Per Panjang Jalan Seluruhnya X 100 %	Bidang Bina Marga
			Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Realisasi RTRW Per Rencana Peruntukan RTRW X 100 %	Bidang Tata Ruang
			Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni Per Jumlah Penduduk	Bidang Perumahan
			Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	Persentase Rumah Tangga Yang Berkases Air Bersih	Rumah Tangga Berakses Air Bersih Per Jumlah Rumah Tangga X 100%	Bidang Cipta Karya
				Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Per Jumlah Rumah Tinggal X 100%	Bidang Cipta Karya
				Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Per Luas Irigasi Kabupaten X 100%	Bidang Sumber Daya Air

Kolonodale, 2 November 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah
Kabupaten Morowali Utara,


DESTUBER MATO'ORI, ST., M.Sc.
NIP. 19731203 200012 1 003

RENCANA AKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN				JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Tenwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Tingkat kepuasan masyarakat											
	PROGRAM				KEGIATAN				AKSI			
NO	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	AKSI	I	II	III	IV
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	7,528,610,221.00	Pembayaran Gaji PNS	√	√	√	√
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan bimbingan teknis	100 persen	240,155,000.00	Mengikuti Pelatihan atau Bimbingan teknis	√			√
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	1,004,828,982.00	Menyediakan fasilitas Peralatan dan perlengkapan Kantor	√	√	√	√
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya dan listrik	100 persen	2,379,379,732.00	Memfasilitasi Penyediaan alat Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	√	√	√	√

SASARAN		INDIKATOR SASARAN				JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI									
Tersedianya prasarana dan sarana air bersih		Persentase Rumah Tangga yang Akses Air Minum Melalui SPAM di seluruh Kabupaten								I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Tersedianya prasarana dan sarana air bersih		PROGRAM				KEGIATAN				AKSI									
NO	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN					REALISASI PELAKSANAAN							
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	100%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kot	Persentase Rumah Tangga Yang Akses Air Minum Melalui SPAM di Seluruh Kabupaten	2616 Unit	10,323,879,643.00	Pembuatan dokumen perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan				I	II	III	IV	I	II	III	IV
Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		INDIKATOR SASARAN								JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI					
Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik								I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik		PROGRAM				KEGIATAN				AKSI									
NO	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN					REALISASI PELAKSANAAN							
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	44%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	tersedianya sarana dan prasarana air limbah	44%	5,361,560,000.00	Pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan				I	II	III	IV	I	II	III	IV

SASARAN		INDIKATOR SASARAN				JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				
SASARAN		INDIKATOR SASARAN				JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				
SASARAN		INDIKATOR SASARAN				JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				
Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Perumahan		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Perumahan Kumuh yang Tersusun												
PROGRAM		KEGIATAN				AKSI				REALISASI				
NO	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN							
1.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Ketersediaan Dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dan kumuh	5%	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan	Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan	5%	250,000,000.00	Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Perumahan.						
SASARAN		INDIKATOR SASARAN				JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				
SASARAN		INDIKATOR SASARAN				JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				
SASARAN		INDIKATOR SASARAN				JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				
Terbangunnya perumahan dan permukiman sesuai standar		Persentase rumah sehat dan layak huni												
PROGRAM		KEGIATAN				AKSI				REALISASI				
NO	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN							
1.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	40,21%	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh pada daerah Kabupaten/Kot	Terbangunnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	40,21%	8,723,314,323.00	meningkatkan Kualitas Perumahan dan Perumahan Kumuh.						



SASARAN		INDIKATOR SASARAN				JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI								
Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan		Panjang Jalan dan Luas Lahan Perumahan																
NO	NAMA	PROGRAM				KEGIATAN				AKSI								
		INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN				
1.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Terbangunnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	13%	13%	107.900.000,00	Urusan Penyelenggaraan Perumahan	Panjang Jalan terbangunnya	13%	107.900.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan								

Kolonodale, 5 Maret 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah
Kabupaten Morowali Utara

DESTUBER MATO'ORI, ST., M.Sc

NIP. 19731203 200012 1 003

	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH</p> <p align="center">Jln. Bumi Bangsa No. 03 Kolomodale - Kode Pos 94671</p>	<p>Nomor SOP 600 / 694.1.6 SOP - LAKIPDUPRKPDP / 1 / 2021</p> <p>Tanggal Pembuatan 5 Januari 2021</p> <p>Tanggal Revisi (ditinjau kembali) 5 Januari 2024</p> <p>Tanggal Efektif 5 Januari 2021</p> <p>Disahkan Oleh KEPALA DINAS,</p>
	 <p align="center">AGUNG SATRIA PONGA, ST., MM. Pembina Tkt. I, IV/b NIP. 19661206 200003 1 003</p>	<p>Nama SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Daerah.</p>

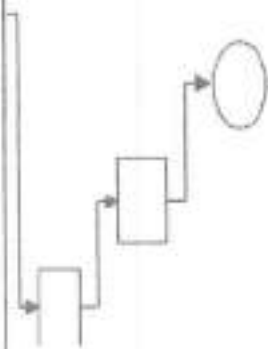
<p>Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neotisme. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37). 3. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 35 Tahun 2019, Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
<p>Kualifikasi Pelaksana</p>	<p>Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa data kinerja SKPD.</p>

<p>Keterkaitan</p> <p>SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Penetapan Kinerja SOP pengadaan barang dan jasa SOP Pengarsipan</p>	<p>Peralatan / Perfengkapan</p> <p>Renstra SKPD Format penyusunan LAKIP Dokumen Penetapan Kinerja Format Pengukuran Kinerja Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD</p>
---	--

<p>Peringatan</p> <p>LAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan berjalan lancar.</p>	<p>Laporan Realisasi Keuangan</p> <p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja</p>
---	---

Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pemukiman dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara.

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu			Ket
		Sekdis	Kasubag Perencanaan Umum, Keuangan dan Aset	Aspiran	Kadis	Kelengkapan	Waktu	
1.	Memerintahkan penyusunan LAKIP Dinas PUPRRPKPD				Disposisi Surat	5 menit	Disposisi surat	SOP alur surat masuk dan surat keluar
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat				Format penyusunan LAKIP Dinas PUPRRPKPD	1 jam	Format penyusunan LAKIP Dinas PUPRRPKPD	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan Sekretariat				Format penyusunan LAKIP Dinas PUPRRPKPD	30 menit	Format penyusunan LAKIP Dinas PUPRRPKPD	
4.	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan Sekretariat				Format penyusunan LAKIP Dinas PUPRRPKPD	1 jam	Format penyusunan LAKIP Dinas PUPRRPKPD	SOP pencarian data dan informasi
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul				Format penyusunan LAKIP Dinas PUPRRPKPD	5 menit	Draft LAKIP Dinas PUPRRPKPD	SOP penetapan kinerja
6.	Membuat dokumen LAKIP Dinas PUPRRPKPD				Draft LAKIP Dinas PUPRRPKPD	1 hari	Dokumen LAKIP Dinas PUPRRPKPD	SOP penetapan kinerja
7.	Mengoreksi Dokumen LAKIP Dinas PUPRRPKPD				Dokumen LAKIP Dinas PUPRRPKPD	2 jam	Dokumen LAKIP Dinas PUPRRPKPD	Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja dan realisasi keuangan
8.	Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Kepala Dinas untuk memintakan persetujuan				Dokumen LAKIP Dinas PUPRRPKPD	3 jam	Dokumen LAKIP	Konsep LAKIP
9.	Penandatanganan dokumen LAKIP Dinas PUPRRPKPD oleh Kepala Dinas				Dokumen LAKIP Dinas PUPRRPKPD	5 menit	Disposisi persetujuan dokumen LAKIP	Dokumen LAKIP Dinas PUPRRPKPD

10.	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat		Konsep surat pengantar	10 menit	Surat Pengantar	SOP alur surat masuk dan keluar
11.	Penggandaan Dokumen LAKIP		Dokumen LAKIP Dinas PUPRRKPD	30 menit	Dokumen LAKIP Dinas PUPRRKPD	SOP pengadaan barang dan jasa
12.	Pengiriman dokumen LAKIP Dinas PUPRRKPD ke Setda L.p. Bagian Organisasi dan Tata Laksana		Dokumen LAKIP Dinas PUPRRKPD	10 menit	Dokumen LAKIP Dinas PUPRRKPD	SOP pengarsipan



 KEPALA DINAS
AGUNG SUTIRIA PONGA, ST., MM.
 Pembina Tkt. I, IV/b
 NIP. 19661206 200003 1 003

